

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014

BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2014 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan Good Corporate Governance dan Clear Government yang melibatkan stakeholders sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

LAKIP Bappeda Tahun 2014 ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis tahun anggaran 2014, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah khususnya Bappeda Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN,



NINING SURTININGSIH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590404 198302 2 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Aspek Strategis	4
D. Struktur Organisasi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KERJA	
A. Rencana Strategis	10
1. Visi dan Misi	10
2. Tujuan dan Sasaran	12
3. Strategi dan Kebijakan	16
4. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014	18
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Penetapan Kinerja Tahun 2014.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja	25
B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
LAMPIRAN :	
1. SK Indikator Kinerja Utama	
2. Penetapan Kinerja Tahun 2014	
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2014	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terwujudnya *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholder, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bappeda Kota Balikpapan sebagai instansi pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan 2011-2016 dan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016 dalam sebuah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2014.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Balikpapan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2001 dan merupakan unsur staf dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tugas Pokok Bappeda Kota Balikpapan adalah membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penilaian Atas Pelaksanaannya.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, fungsi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian;
- Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penelitian;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C.ASPEK STRATEGIS

Bappeda sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Balikpapan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Kelembagaan

Kelembagaan Bappeda Kota Balikpapan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah.

2. Mekanisme Perencanaan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*).

Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Balikpapan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Penyusunan RPJPD 2005 – 2025 Kota Balikpapan, yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013.
- b. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah: Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011.
- c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek: Perencanaan umum, Forum SKPD, Penyusunan RKPD Kota Balikpapan, Penetapan RKPD, Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya : penyusunan Revisi RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, Penyusunan Sistem Moda Transportasi Kota Balikpapan, Review Master Plan Pemukiman Atas air, Studi ALKI II, Studi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Penyusunan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Studi Kelayakan Rencana Pembangunan Pasar dan Terminal, Pengendalian Inflasi, Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Kota, Pemetaan Kawasan Lokasi Investasi di Kota Balikpapan, Penyusunan Renstra Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016, Studi Kelayakan Pembangunan dan lokasi Gedung Diklat, Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan SMK di Balikpapan Barat.
- e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan kota maupun forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dispenda dan Bagian Pembangunan;

4. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Bappeda masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjangnya. Sumber daya manusia di Bappeda masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas maupun kapabilitasnya. Dengan perkembangan sistem perencanaan pembangunan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia perencana yang tanggap dengan melaksanakan pengiriman staf untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan masih belum mencukupi. Perangkat keras untuk mendukung perencanaan pembangunan masih belum memenuhi kebutuhan, baik jumlah, teknologi yang dipakai maupun jenisnya.

Tantangan yang perlu diantisipasi oleh Bappeda Kota Balikpapan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Munculnya berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan *inkonsistensi* perencanaan pembangunan di daerah;
2. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat;
3. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

Peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang RTRW Kota Balikpapan 2012-2032;
2. SDM Aparatur perencana yang sebagian besar berpendidikan tinggi sehingga mempunyai kemampuan dan dedikasi dalam menyusun dan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Bappeda Kota Balikpapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Bappeda Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Bappeda Kota Balikpapan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 dan Renstra Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016.

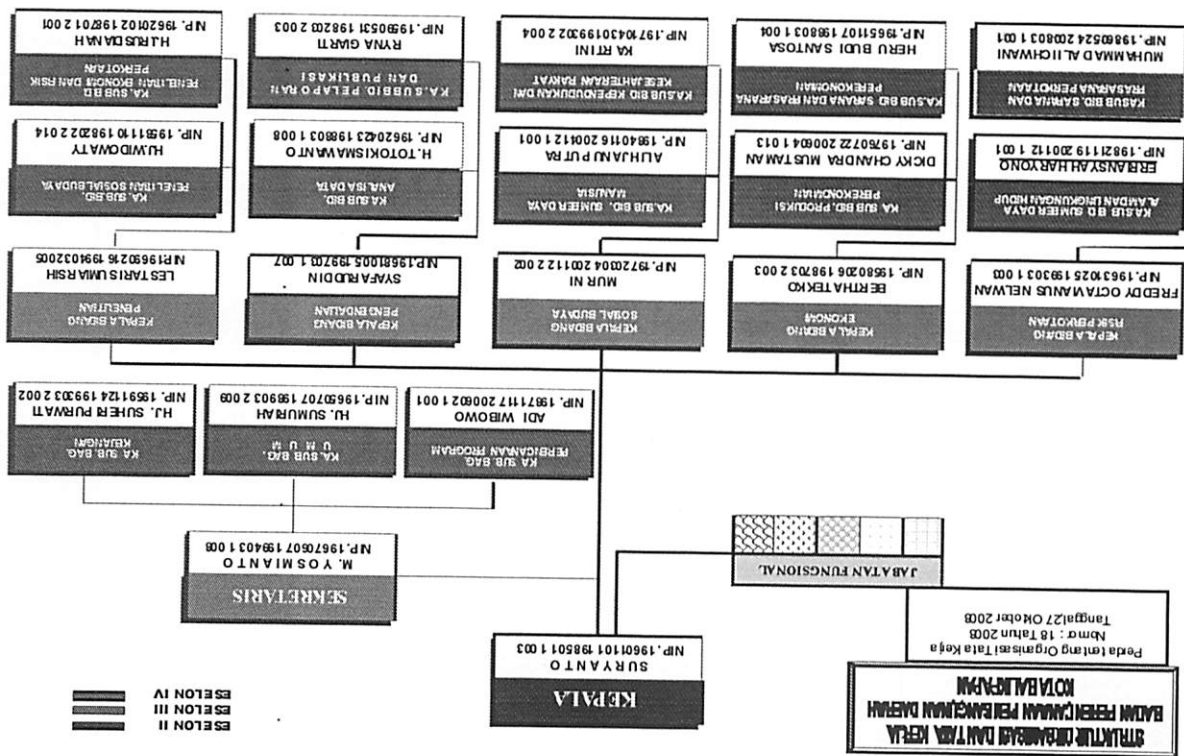
BAB II PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

Bab tersebut berisi latar belakang penyusunan LAKIP Bappeda Tahun 2014 dan profil Bappeda Kota Balikpapan yang meliputi tugas pokok dan fungsi, aspek strategis dan struktur organisasi.

BAB I PENDAHULUAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

E. SISTEMATIKA PENULISAN



Sekretaris dan 5 Kepala Bidang. Struktur organisasi Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja; evaluasi akuntabilitas keuangan; analisis kinerja dan keuangan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2014 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dirangkum dalam kesimpulan terhadap akuntabilitas kinerja serta saran tindak lanjutnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGI DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan dinamika masyarakat yang semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan, maka Bappeda Kota Balikpapan perlu secara berkesinambungan mengembangkan kemampuan, kreatifitas, peluang dan inovasi, sehingga dapat tetap mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penunjang pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Meningkatnya kompetisi dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum, partisipasi dan akomodatif terhadap berbagai bentuk-bentuk pelayanan publik, mendorong Bappeda Kota Balikpapan mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul. Untuk mewujudkan cita-cita itu Bappeda Kota Balikpapan senantiasa mengupayakan berbagai perubahan yang menuju kearah perbaikan kinerja, meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan menetapkan standar-standar kerja guna menunjang penyelesaian tugas-tugas perencanaan yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, dengan harapan agar dapat terwujudnya suatu peningkatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat sebagai implementasi dari pada pelayanan publik.

Oleh sebab itu guna mewujudkan cita-cita tersebut, maka Bappeda Kota Balikpapan telah menetapkan Visi sebagai instrumen untuk menentukan kearah mana pencapaian hasil itu akan dituju. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan dan sangat menentukan kemana Bappeda Kota Balikpapan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Untuk itu Bappeda Kota Balikpapan telah menetapkan visi sebagai pedoman yang menentukan arah pencapaian tujuan yaitu ***"Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kota yang Berkualitas dalam rangka mewujudkan Balikpapan Nyaman Dihuni"***

Visi Bappeda Kota Balikpapan selaras dengan Visi jangka menengah Kota Balikpapan 2011-2016 yaitu : *"Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman"* dan visi jangka panjang Kota Balikpapan 2005-2025, yaitu untuk *"Mewujudkan Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi : Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya dalam Bingkai Madinatul Iman"*. Dalam keterkaitan dengan Visi Kota, maka segenap jajaran Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan perencanaan pembangunan yang dapat diandalkan sebagai dasar dari arah kebijakan pelaksanaan pembangunan. Komitmen tersebut harus dimiliki dan disediakan oleh Bappeda Kota Balikpapan kepada para stakeholders sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya yaitu Perencanaan Pembangunan Kota Balikpapan.

Guna melaksanakan mandat tersebut, secara profesional, dituntut mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang perencanaan, sehingga pimpinan satuan kerja beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Bappeda Kota Balikpapan sebagai suatu organisasi diakui keberadaannya.

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Berdasarkan hal diatas dan untuk pencapaian Visi tersebut Bappeda Kota Balikpapan mempunyai Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota;
2. Meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bappeda Kota Balikpapan, maka hal pertama yang dilakukan adalah menyelenggarakan Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan misi pertama tersebut maka akan tersedia dokumen perencanaan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan Kota Balikpapan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan beserta jajarannya, serta masyarakat luas termasuk para pelaku usaha diberbagai bidang. Selanjutnya melalui misi kedua, semua hasil kerja Bappeda akan mampu diolah sehingga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat dengan mudah dan murah.

Agar semua itu dapat menjadi suatu hasil yang prima, maka Sumber Daya Manusia yang merupakan bagian terpenting, harus selalu ditingkatkan kemampuannya dalam Bidang Perencanaan. Walaupun telah cukup memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai, Bappeda merasakan kebutuhan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam bidang perencanaan agar selalu berada pada posisi terdepan dalam lingkungan yang selalu berubah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan Misi. Dalam rencana strategis Bappeda Kota Balikpapan, tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Misi dan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan, Bappeda Kota Balikpapan menetapkan tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan Strategis Bappeda Kota Balikpapan

Misi		Tujuan Strategis	
1.	Meningkatkan kualitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota;	1.	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;
		2.	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan;

		3.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;
2.	Meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplifikasi perencanaan pembangunan;	4.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;
3.	Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan;	5.	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan;
4.	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	6.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan.

Sasaran Strategis Bappeda Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis Bappeda Kota Balikpapan merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Strategis, dan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau Pencapaian Kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung Pencapaian Tujuan Strategis yang terkait, dengan demikian apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan Tujuan Strategis juga dapat dicapai.

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.	- Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang
3.	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;	1. Terwujudnya pola ruang yang berkelanjutan; 2. Penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Pemanfaatan ruang Kota	1. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	- RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah; - Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan; - Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang.
			2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;	Luas wilayah budidaya pesisir
			3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang.	- Jumlah Fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH
4.	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Rapat koordinasi pembangunan; 2. Peningkatan kawasan pembangunan.	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	Pelaksanaan rapat koordinasi
			2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	- Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB
5.	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terwujudnya Reformasi birokrasi; 2. Pencapaian tahapan pembangunan; 3. Tersedianya sistem informasi pembangunan.	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	- Persentase Keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			2. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan
			3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan
6.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pro sentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam Penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam penyelenggaraan perencanaan Bappeda Kota Balikpapan, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi disusunlah strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan yang nantinya akan dituangkan kedalam program rencana kerja. Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan tahun 2011-2016 di rumuskan sebagai berikut:

1. Strategi dan kebijakan meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan meliputi:

- Memanfaatkan sarana administrasi dan sarana prasarana kerja perkantoran secara efektif dan efisien dalam menunjang kinerja aparatur;
- Memberdayakan SDM melalui pendidikan teknis, formal maupun informal;
- Menerapkan sistem reward and punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.

2. Strategi dan kebijakan untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan dan partisipatif diarahkan melalui:
 - Mengikutsertakan stakeholders pembangunan melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat;
 - Menyediakan sarana sosialisai perencanaan pembangunan kota yang mudah diketahui sehingga membangkitkan semangat partisipatif masyarakat.
3. Strategi dan arah kebijakan dalam Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Tata Ruang Wilayah secara kontinyu, terarah dan sistematis dilakukan melalui:
 - Menyediakan aturan dan acuan yang tegas bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal tata ruang wilayah dan infrastruktur;
 - Melakukan kajian-kajian yang mampu berdampak positif terhadap pengembangan Kota Balikpapan sebagai kota besar;
 - Melibatkan tenaga ahli dan profesional dalam penyusunan dokumen/ kajian infrastruktur wilayah yang mampu berdampak sistemik;
 - Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat).
4. Strategi dan arah kebijakan dalam meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan di konsentrasikan melalui:
 - Meningkatkan frekuensi pertemuan antar SKPD untuk memudahkan koordinasi perencanaan dalam bidang fisik perkotaan, ekonomi dan sosial budaya.
5. Strategi dan arah kebijakan yang bertujuan Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui:
 - Mengembangkan pengelolaan data dan informasi dalam rangka memperoleh data yang akurat guna mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan pembangunan;

- Meningkatkan intensitas kerjasama dengan lembaga penyedia data (BPS) sehingga dapat dihasilkan data yang tepat waktu & tepat sasaran.
6. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan dapat diarahkan melalui:
- Mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan LSM serta lembaga-lembaga penelitian lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Meningkatkan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2011)	2012	2013	2014
1	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	Orang	40 Orang	40	40	41
2	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan.	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	Dokumen (Perda)	0	0	1	0
			2. Tersusunnya RPJMD	Dokumen (Perda)	1 (Perda)	0	0	0
			3. Tersusunnya Renstra SKPD	Dokumen	64 Dokumen	64	67	0
			4. Tersusunnya RKPDP	Dokumen	1 Dokumen	1	1	1
			5. Tersusunnya KUA/PPAS	Dokumen	1 Dokumen	2	2	2
		2. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	70	72	73	75
3	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada	1. Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	Dokumen (Perda)	0	0	1	0
			2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	Kecamatan	0	0	6	0

	kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	RDTRK, Perda Zonasi	0	0	1	0
		2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	Ha	749,2 Ha	10,16	10,16	10,16
		3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	Bangunan	300 Bangunan	300	300	300
			2. Luas Wilayah Hutan Lindung	Ha	14.781 Ha	1.300	0	0
			3. Luas Wilayah RTH	Ha	12 Ha	3	3	3
4	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	24 kali	36 kali	36 kali	38 kali
		2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	%	4,2 %	0,2	0,2	0,2
			2. Persentase pertumbuhan industri;	%	4,55 %	4,65	4,75	4,85
			3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	Trilyun	20,50 Trilyun	27,36	34,22	41,08
			4. Angka PDRB.	Triliun	45,17	47,11	48,45	51,06
5	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	60%	60	65	70
			2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	%	65%	65	70	75
		2. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	%	20%	40	50	60

		3. Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	Kelompok data	8 Kelompok Data	8	8	8
			2. Sistem informasi pembangunan	Sistem	0	0	1	0
6	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	%	50%	50	55	60
			2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	%	40%	50	60	70

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Bappeda Kota Balikpapan menetapkan indikator kinerja utama yang akan menjadi acuan ukuran kinerja dalam rangka menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi.	BAPPEDA
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;	- Tersusunnya RPJP - Tersusunnya RPJMD - Tersusunnya Renstra SKPD - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya KUA/PPAS	BAPPEDA

3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam musrenbang	BAPPEDA
4.	Tersedianya struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	- RTRW Kota Balikpapan menjadi Perda - Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan - Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	BAPPEDA
5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;	Luas wilayah budidaya pesisir	BAPPEDA
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;	- Jumlah fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH	BAPPEDA
7.	Terciptanya koordinasi Internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	Pelaksanaan rapat koordinasi	BAPPEDA
8.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	- Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB	BAPPEDA
9.	Terlaksananya reformasi birokrasi;	- Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	BAPPEDA
10.	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	Persentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	BAPPEDA
11.	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	- Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan	BAPPEDA

12.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;	- Persentase pemanfaatan data hasil penelitian - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang.	BAPPEDA
-----	--	--	---------

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Penetapan kinerja Bappeda tahun 2013 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2014	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	Orang	41	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
						Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	500,000,000.00
						Bimbingan Teknis Peningkatan Keuangan Daerah	188,500,000.00
2	Menghasilkan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah Kota Balikpapan.	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	Dokumen (Perda)	0		
			2. Tersusunnya RPJMD	Dokumen (Perda)	0		
			3. Tersusunnya Renstra SKPD	Dokumen	0		
			4. Tersusunnya RKPD	Dokumen	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	135,000,000.00
						Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan	550,000,000.00
						Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2014	320,000,000.00

			5. Tersusunnya KUA/PPAS	Dokumen	2	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD TA.2015 dan P-APBD TA.2014 Kota Balikpapan	190,000,000.00	
		2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	75	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan		
3	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;	1. Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	Dokumen (Perda)	0			
			2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	Kecamatan	0			
			3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	RDTRK, Perda Zonasi	0			
		2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	Ha	10,16	Program Perencanaan Tata Ruang		
						Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	150,000,000.00	
		3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	Bangunan	300	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan		600,000,000.00
						Penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (3D) Kota Balikpapan		5,000,000,000.00
			2. Luas Wilayah Hutan Lindung	Ha	0			
			3. Luas Wilayah RTH	Ha	3	Pelayanan Informasi Peruntukan Tata Ruang Kota Balikpapan		150,000,000.00
		Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan				357,131,500.00		
4	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	38 kali	Program Pengembangan Data/Informasi		
						Pengendalian dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan		500,000,000.00
						Pengendalian dan Koordinasi Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan		350,000,000.00
		2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	%	0,2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
						Pemeringkatan (Rating) Kemampuan Keuangan Daerah		335,111,500.00
			2. Persentase pertumbuhan industri;	%	4,85	Program Pengembangan Data/Informasi		
3. Kontribusi sektor industri terhadap	Trilyun	41,08	Penyusunan Profil Ekonomi Daerah		345,017,800.00			

			PDRB;						
			4. Angka PDRB.	Triliun	51,06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
						Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	243,202,400.00		
5	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan Pembangunan	745,629,300.00		
			2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	%	75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
							Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109,175,000.00	
		2. Meningkatkan capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	%	60	Program Pengembangan Data/Informasi			
						Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan	350,000,000.00		
						Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan	100,000,000.00		
						Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	250,000,000.00		
						Evaluasi EHRA dan Memorandum Program Sanitasi	450,000,000.00		
						Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Balikpapan	300,000,000.00		
3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	Kelompok data	8	Program Pengembangan Data/Informasi					
				Pengembangan dan Publikasi data Pembangunan	800,000,000.00				
				Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013	200,000,000.00				
	2. Sistem informasi pembangunan	Sistem	0						
6	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	%	60	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Studi Penataan Simpang (Simpang Tiga Km 4,5 s/d 5,5 Soekarno-Hatta dan Simpang Lima BSCC(Dome) Ruhui Rahayu)	600,000,000.00		
						Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di Kota Balikpapan	99,900,000.00		
						Program Perencanaan Sosial Budaya			
						Studi Kelayakan Pengembangan RSKB Sayang Ibu	300,000,000.00		
						Program Perencanaan			

					Pembangunan Daerah		
					Review Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air Limbah Kota Balikpapan	500,000,000.00	
					Penyusunan Master Plan Permukiman Pantai Kawasan Coastal Road Balikpapan	500,000,000.00	
					Penyusunan Master Plan Mitigasi Bencana Kota Balikpapan	500,000,000.00	
					Perspektif Kota Balikpapan 100 Tahun	750,000,000.00	
					Pendampingan Hibah Air Minum dan Air Limbah	650,000,000.00	
			2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	%	70	Koordinasi Operasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Kota Balikpapan	275,000,000.00
						Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Balikpapan	299,987,900.00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA

Mengacu pada ketentuan Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bappeda Kota Balikpapan diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *core business* Bappeda Kota Balikpapan.

Dari 12 sasaran dan 27 indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Bappeda Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Capaian indikator sasaran pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	41 org	42 org	102%
CAPAIAN SASARAN 1 : 102%					
<p>Capaian pada sasaran Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan mencapai 102%. Hal ini dikarenakan realisasi dari pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi berjumlah 42 orang, bertambah dari target awal sebanyak 41 orang. Peningkatan ini disebabkan bertambahnya jumlah pegawai yang bersedia mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Balikpapan.</p>					
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	0	0	0
		2. Tersusunnya RPJMD	0	0	0
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	0	0	0
		4. Tersusunnya RKPD	1	1	100%
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	2	100%
CAPAIAN SASARAN 2 : 100%					
<p>Capaian sasaran kedua pada tahun 2014 adalah 100%. Kegiatan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota Balikpapan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga target dan realisasi indikator tersebut adalah 0. Pada tahun 2014 penyusunan RKPD dan KUA/PPAS telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.</p>					
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	75 %	75 %	100%
CAPAIAN SASARAN 3 : 100%					

Sasaran ketiga Bappeda Kota Balikpapan menitik beratkan pada keterlibatan masyarakat dalam merumuskan pembangunan, dalam hal ini diukur dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang. Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2015 tahun 2014 yang lalu, peserta musrenbang yang hadir mencapai 75% dari peserta yang diundang pada musrenbang. Dengan demikian maka target indikator sasaran presentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang pada tahun 2014 sebesar 75% telah tercapai 100%.

4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	0	0
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	0	0	0
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	0	0	0

CAPAIAN SASARAN 4 : 0

Seluruh indikator pada sasaran strategis tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah tercapai pada tahun 2012 dan 2013. Perda RTRW Kota Balikpapan telah disahkan pada tahun 2012 dan sosialisasi perda tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2013 di 6 Kecamatan Kota Balikpapan.

5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	10,16	100%
---	--	----------------------------------	-------	-------	------

CAPAIAN SASARAN 5 : 100 %

Capaian indikator sasaran pada sasaran ke 5 adalah 100%, hal ini ditandai dengan meningkatnya luas wilayah budidaya pesisir sebesar 10,16 Ha.

6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	320	106%
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	0	0
		3. Luas Wilayah RTH	3	16	533%

CAPAIAN SASARAN 6 : 319%

Pada sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang, indikator sasarannya meliputi jumlah fasilitas umum dan sosial, luas wilayah hutan lindung dan luas wilayah RTH. Jumlah fasilitas umum dan sosial pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 300 bangunan dan tercapai 320 bangunan atau 106%, sedangkan luas wilayah hutan lindung pada tahun 2014 tidak memiliki target capaian dikarenakan pada tahun 2012 telah mencapai 14.781 Ha. Luas wilayah RTH pada tahun 2014 ditargetkan bertambah 3 Ha dan terealisasi sebesar 16 Ha atau 533%. Peningkatan pada tahun 2014 tersebut dikarenakan inventarisasi hutan kota bukit radar dengan data awal 41 Ha setelah diinventarisasi 16 Ha dan 25 Ha milik angkatan laut. Dengan demikian secara keseluruhan capaian pada sasaran enam tersebut adalah 319%.

7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	38 kali	38 kali	100%
---	---	---------------------------------	---------	---------	------

CAPAIAN SASARAN 7 : 100%

Pada sasaran ketujuh indikator yang menjadi tolak ukurnya adalah prosentase pelaksanaan rapat koordinasi. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan pada tahun 2014 ditargetkan 38 kali dalam setahun. Target tersebut dapat tercapai dikarenakan pada tahun 2014 banyak terdapat kegiatan-kegiatan penting yang harus direalisasikan untuk memenuhi target RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016.

8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	4,8 %	15,8 %	375%
		2. Persentase pertumbuhan industri;	4,85 %	16,19 %	333%
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	41,08 T	41,08 T	100%
		4. Angka PDRB.	51,06 T	51,06 T	100%

CAPAIAN SASARAN 8 : 227%

Sasaran berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan memiliki 4 indikator utama. Indikator tersebut adalah Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri, persentase pertumbuhan industri, kontribusi

sektor industri terhadap PDRB dan angka PDRB. Seluruh target kinerja pada sasaran tersebut dapat tercapai secara optimal dan melebihi target yaitu 227%.

9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	70%	70%	100%
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	75%	75%	100%

CAPAIAN SASARAN 9 : 100%

Capaian kinerja sasaran kesembilan pada tahun 2014 adalah 100%. Indikator sasaran ini adalah Presentase keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD yang ditargetkan 70% dan tercapai 70%, serta persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra yang ditargetkan 75% dan dapat terealisasi sebesar 75%. Pencapaian sasaran tersebut dikarenakan pada tahun 2012 telah dilakukan review Renstra SKPD dan akan dilakukan review berkala terhadap renstra tersebut sebagai bentuk penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan.

10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	50%	72%	144%
----	---	---	-----	-----	------

CAPAIAN SASARAN 10 : 144%

Sasaran kesepuluh adalah meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan. Target dari sasaran tersebut pada tahun 2014 adalah tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan mencapai 50%. Berdasarkan hasil evaluasi tengah periode RPJMD Kota Balikpapan 2011-2016 realisasi target tersebut adalah 72%, sehingga pada tahun 2014 sasaran tahapan pembangunan Kota Balikpapan dapat terwujud melewati target.

11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	8	100%
		2. Sistem informasi pembangunan	0	0	0

CAPAIAN SASARAN 11 : 100%

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah diukur dengan indikator jumlah dan jenis data statistik daerah serta sistem informasi pembangunan. Capaian indikator jumlah dan jenis data statistik adalah 100%, sedangkan sistem informasi pembangunan tidak memiliki target karena target renstra pada indikator tersebut telah diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013.

12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	60%	60%	100%
		2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	70%	70%	100%

CAPAIAN SASARAN 12 : 100%

Capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian pada tahun 2014 adalah 100%. Pencapaian ini tidak terlepas dari terpenuhinya target indikator kinerja sasaran yaitu prosentase pemanfaatan data hasil penelitian dan tingkat koordinasi jarlitbang. Prosentase pemanfaatan hasil penelitian pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 60% dan tercapai secara optimal, sehingga pencapaiannya adalah 100%. Tingkat koordinasi jarlitbang yang pada awal tahun 2014 ditargetkan sebesar 70% dapat terealisasi sebesar 70%, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 100%.

Perbandingan Capaian Tahun 2012, 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2012	CAPAIAN 2013	CAPAIAN 2014
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	40 org	42 org	42 org

Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 capaian sasaran pertama tersebut pada tahun 2014 tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan jumlah pegawai yang

mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan di bidang perencanaan dan evaluasi tidak bertambah.					
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	0	1	0
		2. Tersusunnya RPJMD	0	0	0
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	1	0	0
		4. Tersusunnya RKPD	1	2	1
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	2	2
<p>Perbandingan capaian tahun 2013 dengan tahun 2014 pada sasaran kedua tersebut cukup beragam. Hal ini dikarenakan berbedanya periode pembuatan masing-masing dokumen tersebut. Dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 disahkan pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2012 dokumen tersebut belum dapat disahkan. Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2011, sehingga pada tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat capaian indikator tersebut. Pada tahun 2012 Kota Balikpapan hanya menyelesaikan satu dokumen RKPD, akan tetapi berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 Kota Balikpapan menyusun dokumen RKPD dan RKPD Perubahan pada tahun 2013. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 Kota Balikpapan telah menyusun dokumen KUA/PPAS sebanyak dua buah.</p>					
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	70 %	73 %	75%
<p>Presentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang tiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 presentase kehadiran tersebut adalah 70% meningkat menjadi 73% pada tahun 2013 atau sebesar 4,3%. Pada tahun 2014 persentase tersebut meningkat menjadi 75% atau 2,7% jika dibandingkan persentase tahun 2013.</p>					
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	1	0	0
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	0	6	0

		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	0	0	0
<p>Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Balikpapan 2012-2032 telah ditetapkan melalui peraturan daerah pada tahun 2012 dan telah disosialisasikan di setiap kecamatan pada tahun 2013.</p>					
5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir (Ha)	10,16	10,33	10,16
<p>Capaian indikator sasaran ke 5 pada tahun 2012 adalah 10,16. Luas wilayah budidaya pesisir ditargetkan 759,36 Ha pada tahun 2012 menjadi 769,69 Ha pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 10,33 Ha. Pada tahun 2014 luas budidaya pesisir tersebut bertambah kembali seluas 10,16 Ha.</p>					
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial (Bangunan)	300	472	320
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	14.781 Ha	0	0
		3. Luas Wilayah RTH	3 Ha	3 Ha	16 Ha
<p>Pada sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang, indikator sasarannya meliputi jumlah fasilitas umum dan sosial, luas wilayah hutan lindung dan luas wilayah RTH. Jumlah fasilitas umum dan sosial pada tahun 2012 adalah 300 bangunan sedangkan pada tahun 2013 mencapai 472 bangunan atau meningkat 57% dan pada tahun 2014 bertambah 320 bangunan. Meskipun mengalami penurunan dari segi peningkatan jumlah bangunan akan tetapi realisasi jumlah bangunan tersebut telah melewati target kinerja tahun 2015. Luas wilayah hutan lindung pada tahun 2013 tidak ada pencapaian dikarenakan pada tahun 2012 telah mencapai 14.781 Ha. Capaian luas wilayah RTH pada tahun 2013 bertambah 3 Ha dibandingkan dengan tahun 2012 dan pada tahun 2014 bertambah sebesar 16 Ha. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya inventarisasi hutan kota bukit radar seluas 16 Ha.</p>					

7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	32 kali	36 kali	38 Kali
<p>Pada tahun 2013 capaian indikator sasaran pelaksanaan rapat koordinasi adalah 36 kali, meningkat dari capaian tahun 2012 sebesar 32 kali atau 12,5%. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan rapat koordinasi sebanyak 38 kali, dengan kata lain telah terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2013 sebesar 5,5%.</p>					
8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	4,4 %	5,84 %	15,8 %
		2. Persentase pertumbuhan industri;	1,04 %	4,75 %	16,19 %
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	45,19 T	23,59T	41,08 T
		4. Angka PDRB.	47,3 T	48,45 T	51,06 T
<p>Berdasarkan data diatas dapat dilihat perbandingan capaian sasaran kedelapan pada tahun 2012, 2013 dan 2014. Capaian luasan kawasan terbuka mengalami peningkatan, realisasi pada tahun 2014 sebesar 15,8% meningkat 171% jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 5,84%. Angka PDRB pada tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5,3%. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2013 mengalami penurunan dikarenakan produksi pengelolaan migas yang fluktuatif setiap tahunnya, akan tetapi diprediksi dapat meningkat hingga 41,08 T pada tahun 2014.</p>					
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	60%	65%	70%
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	68%	70%	75%
<p>Pada tahun 2013 capaian indikator presentase keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD adalah 65% meningkat 8,3% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 60%. Presentase kesesuaian program renstra pada tahun 2013 sebesar 70% meningkat 2,9% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 70%. Pada tahun 2014 seiring dengan telah berjalannya sistem informasi perencanaan pembangunan dan kegiatan</p>					

evaluasi RPJMD, maka terjadi peningkatan keselarasan renstra SKPD dengan RPJMD dan program tahunan SKPD dengan renstra masing-masing sebesar 7,6% dan 7,1%.

10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	28%	50%	72%
----	---	---	-----	-----	-----

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan pada tahun 2013 telah mencapai 50%. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 28%. Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Balikpapan, hingga saat ini capaian pelaksanaan tahapan pembangunan Kota Balikpapan adalah 72%. Peningkatan yang cukup signifikan ini dikarenakan fokus Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyelesaikan target sasaran pembangunan pada RPJMD 2011-2016.

11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	8	8
		2. Sistem informasi pembangunan	1	1	0

Pada tahun 2014 terdapat delapan jenis data statistik daerah, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2012. Sistem informasi pembangunan pada tahun 2012 telah diwujudkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan dikembangkan pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2014 tidak ada realisasi terkait indikator tersebut.

12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	50%	55%	60%
		2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	50%	60%	70%

Prosentase pemanfaatan data hasil penelitian pada tahun 2012 adalah sebesar 50%, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 55% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 60%. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya dokumen

penelitian dan kajian yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Tingkat koordinasi jarlitbang pada tahun 2013 adalah 60%, meningkat 20% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar 50%. Pada tahun 2014 meningkat 16% menjadi 70%.

Jika dilihat dari hasil perbandingan keseluruhan capaian pada tahun 2014 dengan tahun 2013, maka terdapat beberapa peningkatan capaian indikator sasaran. Peningkatan tersebut antara lain terdapat pada sasaran sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja, Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan, Terlaksananya Reformasi Birokrasi, Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan, Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2013.

B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2014 total belanja langsung Bappeda Kota Balikpapan adalah sebesar Rp.20.251.230.400,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.4.160.035.000,- , sehingga total anggaran belanja Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah Rp.24.411.265.400,-. Realisasi belanja langsung tahun 2014 adalah sebesar Rp.14.094.111.826,- atau 69,60%, sedangkan realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp.3.896.936.273,- atau 93,68%. Akuntabilitas keuangan berdasarkan sasaran Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2014	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan	Orang	41	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
					Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	500,000,000	495,322,000	99.06

		evaluasi			Bimbingan Teknis Peningkatan Keuangan Daerah	188,500,000	183,830,500	97.52	
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	Dokumen (Perda)	0					
		2. Tersusunnya RPJMD	Dokumen (Perda)	0					
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	Dokumen	0					
		4. Tersusunnya RKPD	Dokumen	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				
					Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	135,000,000	88,684,900	65.69	
					Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan	550,000,000	432,828,860	78.69	
		Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2014	320,000,000	176,601,788	55.18				
5. Tersusunnya KUA/PPAS	Dokumen	2	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD TA.2015 dan P-APBD TA.2014 Kota Balikpapan	190,000,000	163,753,400	86.18			
3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	75	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan				
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	Dokumen (Perda)	0					
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	Kecamatan	0					
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	RDTRK, Perda Zonasi	0					
5.	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	Ha	10,16	Program Perencanaan Tata Ruang				
					Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	150,000,000	110,553,063	73.70	
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial Ruang	Bangunan	300	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan	600,000,000	577,229,405	96.20	
					Penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (3D) Kota Balikpapan	5,000,000,000	2,020,442,839	40.40	
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	Ha	0					
					3. Luas Wilayah RTH	Ha	3	Pelayanan Informasi Peruntukan Tata Ruang Kota Balikpapan	150,000,000
			Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan	507,131,500				418,724,582	82.56
7.	Terciptanya	1. Pelaksanaan	kali	38 kali	Program Pengembangan				

	koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	rapat koordinasi			Data/Informasi			
					Pengendalian dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan	500,000,000	394,974,678	78.99
					Pengendalian dan Koordinasi Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan	350,000,000	193,393,845	55.25
8.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	%	0,2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
					Pemeringkatan (Rating) Kemampuan Keuangan Daerah	135,111,500	69,243,560	51.24
		2. Persentase pertumbuhan industri;	%	4,85	Program Pengembangan Data/Informasi			
					Penyusunan Profil Ekonomi Daerah	345,017,800	303,660,896	88.01
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	Trilyun	41,08	Penyusunan Profil Ekonomi Daerah			
		4. Angka PDRB.	Triliun	51,06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
					Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	243,202,400	197,107,191	81.04
9.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	70	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan Pembangunan	745,629,300	644,398,530	86.42
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	%	75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	109,175,000	78,763,500	72.14
10.	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	%	60	Program Pengembangan Data/Informasi			
					Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan	350,000,000	162,433,178	46.40
					Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan	100,000,000	66,754,170	66.75
					Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	250,000,000	181,640,380	72.65
					Evaluasi EHRA dan Memorandum Program Sanitasi	450,000,000	403,273,284	89.61
					Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Balikpapan	300,000,000	197,107,191	65.70
11.	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	Kelompok data	8	Program Pengembangan Data/Informasi			
					Pengembangan dan Publikasi data Pembangunan	800,000,000	565,662,625	70.70
					Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013	200,000,000	176,683,300	88.34
		2. Sistem informasi pembangunan	Sistem	0				
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	%	60	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
					Studi Penataan Simpang (Simpang Tiga Km 4,5 s/d 5,5 Soekarno-Hatta dan Simpang Lima BSCC(Dome) Ruhui Rahayu)	600,000,000	526,844,355	87.80

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.				Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di Kota Balikpapan	99,900,000	99,635,000	99.73
				Program Perencanaan Sosial Budaya			
				Studi Kelayakan Pengembangan RSKB Sayang Ibu	300,000,000	240,849,200	80.28
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Review Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air Limbah Kota Balikpapan	500,000,000	432,887,650	86.57
				Penyusunan Master Plan Permukiman Pantai Kawasan Coastal Road Balikpapan	500,000,000	411,818,594	82.36
				Penyusunan Master Plan Mitigasi Bencana Kota Balikpapan	500,000,000	428,037,073	85.60
				Perspektif Kota Balikpapan 100 Tahun	750,000,000	559,278,600	74.57
				Pendampingan Hibah Air Minum dan Air Limbah	650,000,000	378,571,614	58.24
	2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	%	70	Koordinasi Operasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Kota Balikpapan	275,000,000	201,233,432	73.17
			Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Balikpapan	299,987,900	275,010,584	91.67	

Capaian Keuangan Sasaran 1 :

Kegiatan pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan adalah Peningkatan kapasitas teknis aparatur perencana. Pada tahun 2014 rencana anggaran kegiatan tersebut adalah Rp. 688.500.000,- sedangkan realisasi keuangan dari kegiatan tersebut adalah 99% atau Rp.679.152.500,-.

Capaian Keuangan Sasaran 2 :

Kegiatan pada sasaran strategis Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien meliputi kegiatan Review RPJPD Kota Balikpapan 2006-2026, Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2015 serta Penyusunan KUA/PPAS RAPBD 2015 dan P-APBD TA. 2014 Kota Balikpapan. Realisasi anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.861.868.948,- atau 72% dari target anggaran sebesar Rp.1.195.000.000,-. Capaian realisasi tersebut dikarenakan adanya verifikasi honor panitia pada setiap kegiatan pada sasaran tersebut.

Capaian Keuangan Sasaran 3 :

Sasaran tersebut meliputi kegiatan Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan. Pagu dana anggaran pada kegiatan tersebut adalah Rp. 550.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 432.828.860,- atau 78,70%.

Capaian Keuangan Sasaran 4 :

Sasaran strategis Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan meliputi indicator RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah, Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan, Tersedianya Dokumen-dokumen perencanaan Tata Ruang telah tercapai pada Tahun 2012 dan Tahun 2013, sehingga pada Tahun 2014 ini kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Capaian Keuangan Sasaran 5 :

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Tersedianya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah Operasional Badan Koordinasi Pentaraan Ruang Daerah Kota Balikpapan. Anggaran pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 150,000,000,- dan realisasinya sebesar Rp. 110.553.063,- atau 73,70%. Rendahnya realisasi kegiatan tersebut dikarenakan adanya penghematan belanja dan verifikasi honor tim BKPRD Kota Balikpapan.

Capaian Keuangan Sasaran 6 :

Capaian sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Ruang didukung oleh kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan, Penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (3D) Kota Balikpapan, Pelayanan Informasi Tata Ruang Kota Balikpapan dan Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp.6.257.131.500,- dan terealisasi sebesar Rp.3.137.782.104 atau 50%.

Capaian Keuangan Sasaran 7 :

Sasaran strategis terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid, dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu Pengendalian dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan, Pengendalian dan

Koordinasi Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan. Total anggaran dari kegiatan tersebut adalah Rp. 850.000.000,-. Realisasi dari total anggaran tersebut adalah Rp.588.368.523,- atau 69%.

Capaian Keuangan Sasaran 8 :

Pada tahun anggaran 2014, sasaran strategis Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dicapai melalui beberapa kegiatan yaitu Pemingkatan (Rating) Kemampuan Keuangan Daerah, Penyusunan Profil Ekonomi Daerah, Pengendalian Inflasi Daerah (PID). Target anggaran untuk sasaran tersebut adalah Rp. 723.331.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 570.011.647,- atau 79 %.

Capaian Sasaran 9 :

Kegiatan pada sasaran strategis tersebut antara lain Pengendalian dan Evaluasi Program/kegiatan pembangunan dan Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan total alokasi anggaran Rp.854.804.300,-. Realisasi pada tahun 2014 sebesar Rp.723.162.030 atau 85 %. Rendahnya realisasi keuangan sasaran tersebut dikarenakan honor untuk panitia kegiatan tidak direalisasikan akan tetapi kegiatan tersebut tetap terlaksana dengan baik. Disamping itu pula terdapat kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program/kegiatan pembangunan yang tidak terealisasi secara optimal.

Capaian Sasaran 10 :

Pada sasaran tersebut terdapat kegiatan yang menunjang pencapaiannya yaitu Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan, Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan, Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Evaluasi EHRA dan Memorandum Program Sanitasi, Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Balikpapan adalah Rp. 1.011.208.203,- atau 70% dari pagu anggaran 2014 sebesar Rp.1.450.000.000,-. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan tidak terlaksananya workshop untuk menunjang kegiatan tersebut, akan tetapi

laporan kegiatan yang merupakan output dari evaluasi program tersebut tetap terlaksana.

Capaian Sasaran 11 :

Sasaran kesebelas yaitu meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah terdiri atas dua indikator sasaran yaitu jumlah dan jenis data statistik daerah dan sistem informasi pembangunan. Total anggaran pada sasaran tersebut adalah Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 742.345.925,- atau 74%. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran tersebut adalah Pengembangan dan Publikasi data Pembangunan, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan. Seluruh kegiatan pada sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

Capaian Sasaran 12 :

Sasaran Meningkatkan pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang terdiri atas delapan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.3.899.900.000,-. Realisasi keuangan dari sasaran tersebut adalah Rp.3.077.922.086,- atau 79%.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada tahun 2014, Bappeda Kota Balikpapan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan. Sehubungan dengan tersebut, sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2014. Tujuan dari penyusunan dokumen tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Bappeda Kota Balikpapan sehingga akan memudahkan dalam proses pengendalian dan evaluasi instansi pemerintah.

Secara kumulatif, capaian kinerja Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2014 adalah 101,42%, sedangkan capaian akuntabilitas keuangan adalah sebesar 76,84%. Apabila dilihat dari keseluruhan presentase capaian kinerja, maka kinerja Bappeda Kota Balikpapan dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Balikpapan pada tahun 2014 secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pencapaian target kinerja lebih dititik beratkan pada indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Balikpapan dengan tidak mengesampingkan target kinerja indikator lainnya. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dikelola dengan seefisien mungkin sehingga terdapat beberapa penghematan dalam pengeluaran belanja SKPD. Efisiensi anggaran yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 antara lain adalah efisiensi biaya perjalanan dinas dan efisiensi honorarium kegiatan pegawai. Efisiensi biaya perjalanan dinas dilakukan dengan cara menyeleksi keperluan-keperluan perjalanan dinas yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan dengan sifat lebih prioritas dan penting. Sedangkan efisiensi honorarium kegiatan pegawai dilakukan dengan cara memverifikasi ulang besaran honor yang akan diberikan sesuai asas kepatutan dan kelayakan.

Diantara program dan kegiatan tersebut terdapat satu sasaran yang belum dapat dicapai secara maksimal yaitu Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan target salah satu indikator pada sasaran tersebut tidak dapat tercapai yaitu Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang. Dokumen perencanaan tata ruang yang dimaksud adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Balikpapan, RDTR Kota Balikpapan belum dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah karena materi substansi RDTR Kota Balikpapan cukup mendetail dan rumit sehingga dibutuhkan kajian lebih mendalam dan waktu yang tidak sedikit pula. Ditargetkan pengesahan Peraturan Daerah tentang Dokumen RDTR tersebut akan dilakukan pada tahun 2015. Disamping itu pula terdapat kegiatan multiyears yang dilanjutkan pada tahun 2015 yaitu kegiatan Penyusunan Peta Nilai Zona Tanah Kota Balikpapan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Bappeda Kota Balikpapan, antara lain :

1. Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Bappeda Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasilguna;
2. Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif sehingga seluruh aparatur Bappeda Kota Balikpapan memiliki kompetensi yang lebih di masing-masing bidang.

Demikian saran yang dapat diperhatikan dan dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas kinerja Bappeda Balikpapan kedepannya.

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN' at the top and 'BALIKPAPAN' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH'.
KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN,

NINING SURTINGSIH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590404 198302 2 005

PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	41 org	42 org	102%
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya RPJP	0	0	0
		2. Tersusunnya RPJMD	0	0	0
		3. Tersusunnya Renstra SKPD	0	0	0
		4. Tersusunnya RKPD	1	1	100%
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	2	2	100%
3	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	75 %	75 %	100%
4	Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	0	0	0
		2. Tersosialisasinya RTRW Kota Balikpapan	0	0	0
		3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	0	0	0
5	Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	10,16	10,16	100%
6	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	300	320	106%
		2. Luas Wilayah Hutan Lindung	0	0	0
		3. Luas Wilayah RTH	3	16	533%
7	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	38 kali	38 kali	100%
8	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	4,8 %	15,8 %	375%
		2. Persentase pertumbuhan industri;	4,85 %	16,19 %	333%
		3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	41,08 T	41,08 T	100%

		4. Angka PDRB.	51,06 T	51,06 T	100%
9	Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	70%	70%	100%
		2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	75%	75%	100%
10	Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	50%	72%	144%
11	Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	8	8	100%
		2. Sistem informasi pembangunan	0	0	100%
12	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	60%	60%	100%
		2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	70%	70%	100%



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURYANTO**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**
Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Kedua,


H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,


SURYANTO



PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN

: BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN
: 2014

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2014	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatkan kualitas SDM Bappeda Kota Balikpapan;	1. Meningkatkan kualitas SDM perencanaan pembangunan;	1. Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi	Orang	41	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500.000.000,00
						Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	
2	Memphasikan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sebagai landasan pembangunan daerah kota Balikpapan.	1. Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien		Dokumen (Perda)	0	Bimbingan Teknis Peningkatan Keuangan Daerah	188.500.000,00
						1. Tersusunnya RPJP	0
						2. Tersusunnya RPJMD	0
						3. Tersusunnya Renstra SKPD	0
						4. Tersusunnya RKPD	1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
		Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	135.000.000,00				
		Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan	550.000.000,00				
		Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2014	320.000.000,00				
		5. Tersusunnya KUA/PPAS	Dokumen	2	Penyusunan KUA, PPAS RAPBD TA.2015 dan P-APBD TA.2014 Kota Balikpapan	190.000.000,00	
	2. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan		1. Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	75	Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD TA.2015 Kota Balikpapan	

3	Menghasilkan dokumen teknis perencanaan pembangunan kota berbasis pada kebijakan-kebijakan tata ruang wilayah;	1. Tersedianya Struktur & pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	1. RTRW Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah	Dokumen (Perda)	0			
			2. Tersosialisasi nya RTRW Kota Balikpapan	Kecamatan	0			
			3. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	RDTRK, Perda Zonasi	0			
		2. Tersedianya Tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luas wilayah budidaya pesisir	Ha	10,16	Program Perencanaan Tata Ruang		
						Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	150.000.000,00	
		3. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Jumlah fasilitas umum dan sosial	Bangunan	300	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang (SIMTARU) Kota Balikpapan		600.000.000,00
						Penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (3D) Kota Balikpapan		5.000.000.000,00
						Pelayanan Informasi Peruntukan Tata Ruang Kota Balikpapan		150.000.000,00
						Persetujuan Substansi Raperda RDTR Kota Balikpapan		507.131.500,00
						Program Pengembangan Data/Informasi		
4	Meningkatkan kerjasama yang harmonis lintas SKPD guna mewujudkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	1. Pelaksanaan rapat koordinasi	kali	38 kali	Pengendalian dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Balikpapan		500.000.000,00
						Pengendalian dan Koordinasi Penyelenggaraan CSR Kota Balikpapan		350.000.000,00
						Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
		2. Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan.	1. Jumlah Luasan kawasan terbuka pada lahan industri;	%	0,2	Pemeriksaan (Rating) Kemampuan Keuangan Daerah		135.111.500,00
						Program Pengembangan Data/Informasi		
		2. Persentase pertumbuhan industri;	%	4,85	Penyusunan Profil Ekonomi Daerah		345.017.800,00	
					Penyusunan Profil Ekonomi Daerah			
3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;	Trilyun	41,08						

			4. Angka PDRB.	Triliun	51,06	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
5	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi perencanaan pembangunan untuk mengembangkan sistem evaluasi, dan monitoring pelaksanaan pembangunan	1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi;	1. Persentase keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	%	70	Pengendalian Inflasi Daerah (PID)	243.202.400,00	
			2. Meningkatkan capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;	2. Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra	%	75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
				3. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Prosentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan	%	60	Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan Pembangunan
			Operasional Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					109.175.000,00
		Program Pengembangan Data/Informasi						
		Penyusunan Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMREDA) Kota Balikpapan	350.000.000,00					
		Evaluasi Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU-Cipta Karya Kota Balikpapan	100.000.000,00					
		Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	250.000.000,00					
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1. Jumlah dan jenis data statistik daerah	Kelompok data	8	Evaluasi EHRA dan Memorandum Program Sanitasi	450.000.000,00	
						Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Kota Balikpapan	300.000.000,00	
Program Pengembangan Data/Informasi								
Pengembangan dan Publikasi data Pembangunan	800.000.000,00							
2. Sistem informasi pembangunan	2. Sistem informasi pembangunan	Sistem	0	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Kota Balikpapan Tahun 2013	200.000.000,00			
6	Mewujudkan penelitian dan pengembangan pembangunan di Kota Balikpapan;	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang.	1. Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian	%	60	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Studi Penataan Simpang (Simpang Tiga Km 4,5 s/d 5,5 Soekarno-Hatta dan Simpang Lima BSCC(Dome) Ruhui Rahayu)	600.000.000,00	
						Studi Kelayakan Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) di Kota Balikpapan	99.900.000,00	
						Program Perencanaan Sosial Budaya		

					Studi Kelayakan Pengembangan RSKB Sayang Ibu	300.000.000,00	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Review Penyusunan Master Plan Pengelolaan Air Limbah Kota Balikpapan	500.000.000,00	
					Penyusunan Master Plan Permukiman Pantai Kawasan Coastal Road Balikpapan	500.000.000,00	
					Penyusunan Master Plan Mitigasi Bencana Kota Balikpapan	500.000.000,00	
					Perspektif Kota Balikpapan 100 Tahun	750.000.000,00	
					Pendampingan Hibah Air Minum dan Air Limbah	650.000.000,00	
			2. Tingkat Koordinasi pelaksanaan jarlitbang	%	70	Koordinasi Operasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Jarlitbang) Kota Balikpapan	275.000.000,00
						Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Balikpapan	299.987.900,00

Jumlah Anggaran : Rp 17.643.655.400,00
Program : 9 Program

Balikpapan, Januari 2014
KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPA



SURYANTO
Pembina Utama Muda
19601101 198501 1 003



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Jl. JEND. SUDIRMAN RT. 13 No.1 Telp. (0542) 422515
BALIKPAPAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 188.4.46/17/BPD-SKT

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2011-2016**

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RPJMD Kota Balikpapan tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Balikpapan 2011-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu

menetapkan dalam Peraturan Walikota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.**

Pasal 1

(1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen

perencanaan Bappeda Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan;	Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi.	BAPPEDA
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien;	- Tersusunnya RPJP - Tersusunnya RPJMD - Tersusunnya Renstra SKPD - Tersusunnya RKPD - Tersusunnya KUA/PPAS	BAPPEDA
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam musrenbang	BAPPEDA
4.	Tersedianya struktur & pola ruang yang berwawasan	- RTRW Kota Balikpapan menjadi Perda - Tersosialisinya RTRW Kota Balikpapan	BAPPEDA

	lingkungan dan berkelanjutan;	- Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	
5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;	- Luas wilayah budidaya pesisir	BAPPEDA
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;	- Jumlah fasilitas umum dan sosial - Luas Wilayah Hutan Lindung - Luas Wilayah RTH	BAPPEDA
7.	Terciptanya koordinasi Internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;	Pelaksanaan rapat koordinasi	BAPPEDA
8.	Berkembangnya kawasan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;	- Jumlah luasan kawasan terbuka pada lahan industri - Persentase pertumbuhan industri - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB - Angka PDRB	BAPPEDA
9.	Terlaksananya	- Persentase keselarasan	BAPPEDA

	<p>reformasi birokrasi;</p>	<p>Renstra SKPD dengan RPJMD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase program kegiatan tahunan yang sesuai dengan renstra 	
10.	<p>Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan pembangunan;</p>	<p>Persentase capaian pelaksanaan tahapan pembangunan</p>	BAPPEDA
11.	<p>Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan jenis data statistik daerah - Sistem informasi pembangunan 	BAPPEDA
12.	<p>Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemanfaatan data hasil penelitian - Tingkat koordinasi pelaksanaan jarlitbang. 	BAPPEDA

Pasal 2

Bappeda Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Bappeda Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam Keputusan ini.

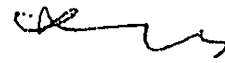
Pasal 3

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 2 April 2013

KEPALA BAPPEDA KOTA BALIKPAPAN



SURYANTO

Pembina Utama Muda
19601101 198501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Balikpapan (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Inspektur Inspektorat Kota Balikpapan.